

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Rabu, 24 Oktober 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Rabu, 24 Oktober 2018	Jalan Tok Bawen – Jogja Tetap Dilanjutkan	Kendati sempat berpolemik dengan adanya penolakan dari Panitia Khusus Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah DPRD Jawa Tengah, proyek jalan tol Bawen – Yogyakarta dipastikan masih berstatus sebagai proyek strategis nasional dan tetap dilanjutkan.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Rabu, 24 Oktober 2018	Musi IV Rampung Sesuai Target Kontrak	Pembangunan Jembatan Musi IV sudah mencapai progres 97% sehingga proyek ini bakal rampung sesuai dengan kontrak pada 18 November 2018
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Rabu, 24 Oktober 2018	KEK Antisipasi Bencana	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK sudah menyiapkan langkah preventif dan merancang sistem zonasi yang aman sebagai langkah untuk mengantisipasi risiko geologis serta potensi ancaman bencana alam terhadap kawasan tersebut.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Rabu, 24 Oktober 2018	Jateng Pacu Pelabuhan Terintegrasi Industri	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjajaki penambahan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri, perumahan, serta infrastruktur lainnya.
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Rabu, 24 Oktober 2018	Banyak Terobosan yang Belum Jalan	Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia menganggap dalam 4 tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla muncul banyak terobosan kebijakan di bidang properti.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Rabu, 24 Oktober 2018	Berita Foto	Program Sejuta Rumah
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Rabu, 24 Oktober 2018	FLPP Terganjil Sertifikat Layak Fungsi	Belum banyaknya pemerintah daerah yang memiliki aturan sertifikat layak fungsi membuat penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tersendat.
8	Koran Tempo (Halaman, 21)	Rabu, 24 Oktober 2018	Sisa Target Jalan Tol 911 Kilometer Digeber pada 2019	Kementerian PUPR mengebut target penambahan jalan tol baru hingga akhir masa pemerintahan presiden Joko Widodo tahun depan
9	Koran Tempo (Halaman, 21)	Rabu, 24 Oktober 2018	Berita Foto	Foto Udara pembangunan simpang susun jalan tol Sumatera ruas Kayu Agung-Palembang-Betung.
10	Koran Tempo (Halaman, 27)	Rabu, 24 Oktober 2018	PAM Jaya Berfokus Tambah Jaringan Pipa di Kawasan Pesisir	PDAM Jakarta Raya berfokus menambah jaringan pipa air bersih di kawasan pesisir utara Jakarta hingga tahun depan.
11	Media Indonesia (Halaman, 18)	Rabu, 24 Oktober 2018	Jokowi Antar Pariwisata RI Ke Peringkat 9 Dunia	Pertumbuhan pariwisata Indonesia Januari – Desember 2017 mencapai 22% atau di atas rata-rata
12	Media Indonesia (Halaman, 19)	Rabu, 24 Oktober 2018	Berita Foto	Tol Brebes Timur - Pemalang

Judul	Jalan Tok Bawen – Jogja Tetap Dilanjutkan	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kendati sempat berpolemik dengan adanya penolakan dari Panitia Khusus Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah DPRD Jawa Tengah, proyek jalan tol Bawen – Yogyakarta dipastikan masih berstatus sebagai proyek strategis nasional dan tetap dilanjutkan.		

► PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Jalan Tol Bawen–Jogja Tetap Dilanjutkan

JAKARTA — Kendati sempat berpolemik dengan adanya penolakan dari Panitia Khusus Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah DPRD Jawa Tengah, proyek jalan tol Bawen–Yogyakarta dipastikan masih berstatus sebagai proyek strategis nasional dan tetap dilanjutkan.

Irene Apustine
irene.apustine@bisnis.com

Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah memberi arahan supaya polemik rencana pembangunan proyek sepanjang 71 kilometer tersebut segera diselesaikan. Sampai saat ini, tuturnya, proyek dengan perkiraan nilai investasi Rp12,30 triliun tersebut masih masuk dalam daftar

► **Presiden Jokowi sudah memberi arahan supaya polemik pembangunan tol Bawen–Yogyakarta segera diselesaikan.**

proyek strategis nasional (PSN).

"Sampai saat ini belum ada arahan proyek tersebut dikeluarkan dari PSN," kata Rainier kepada Bisnis, Selasa (23/10).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memastikan proyek tol Bawen–Yogyakarta akan tetap berjalan kendati sempat menimbulkan polemik karena Pansus Perda RTRW DPRD Jawa Tengah menolak rencana pembangunan tol tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa proyek jalan tol Bawen–Yogyakarta akan tetap berlangsung. Pasalnya, setelah dilakukan pengecekan ternyata daerah yang dilalui tidak berada pada lahan rawan gempa.

"Jadi, itu tetap berjalan. Kan, kemarin ada penolakan karena katanya faktor kegempaan. Setelah kami cek ternyata daerah yang dilalui tidak berada di daerah

TRASE BERADA DI JALUR AMAN

Sempat mendapat penolakan dari Pansus Perda Rencana Tata Ruang Wilayah DPRD Jawa Tengah, rencana pembangunan proyek jalan tol Bawen–Yogyakarta akhirnya memperoleh restu dari Gubernur Ganjar Pranowo. Pasalnya, setelah dilakukan pengecekan ternyata daerah yang dilalui tidak berada pada lahan rawan gempa. Itu artinya proyek yang tengah bergeser dalam hal penetapan lokasinya mendapat kepastian untuk dibangun. Rencananya pembangunan akan dilaksanakan pada tahun depan.

Sekilas Proyek Jalan Tol Bawen–Yogyakarta

- Panjang : 71 kilometer
- Nilai investasi : Rp12,13 triliun
- Rencana Rues : 2 (Bawen–Magelang dan Magelang–Yogyakarta)
- Progres : Penyiapan proyek
- Status : Proyek Strategis Nasional, prakarsa pemerintah
- Rencana konstruksi /pembangunan pembiayaan : 2019

Sumber : APFWS, data BSN/INACIYO ENO

tawan gempa. Kemudian, alasan kedua soal lahan subur, setelah dicek ternyata mayoritas lahan di sana itu tadah hujan. Jadi, data itu juga tidak benar," kata Ganjar di Semarang, Selasa (23/10).

Gubernur menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada alternatif lain untuk solusi konektivitas di daerah itu sehingga pembangunan jalan tol tetap akan berjalan.

"Jika alternatifnya kereta api, itu belum ada project atau dorongan kita untuk melakukan itu, yang sudah ada hanya reaktivasi," tambahnya.

Selain itu, saat musyawarah perencanaan pembangunan nasional, pihaknya juga mengaku sudah menyampaikan terkait dengan rencana proyek jalan tol itu. Menurutnya, hanya hanya persoalan data yang belum valid sehingga terjadi polemik.

Pansus Perda RTRW DPRD Jateng, lanjut Ganjar, juga sudah setuju untuk daduk bersama menetapkan data. Kecepatan data menjadi hal yang penting untuk memulai sebuah pembangunan.

"Kalau itu memang bahaya sekali, saya juga oke untuk memindahkan. Kita carikan tempat lain yang tidak mengganggu. Soal nanti lewat mana, kalau memang mengganggu KTRW akan kita tata ulang," katanya.

Sebelumnya, pembangunan proyek yang melintasi dua provinsi, Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut dicoret dalam pengesahan RTRW Jawa Tengah yang dilakukan pada pekan lalu.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berlama-lama untuk menentukan sikap terkait dengan proyek yang tengah dalam proses penetapan lokasi tersebut.

"Ya, mengenai rencana pembangunan tol Bawen–Yogyakarta sedang dalam tahap studi dan segera akan diputuskan," kata Jokowi saat mengunjungi Pongpes Girikesumo Kabupaten Demak, Jumat (19/10).

Presiden memastikan bahwa salah satu tujuan dibangunnya setiap infrastruktur adalah memperkuat daya saing suatu negara untuk bersaing dalam era globalisasi. **anb**

Judul	Musi IV Rampung Sesuai Target Kontrak	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Pembangunan Jembatan Musi IV sudah mencapai progres 97% sehingga proyek ini bakal rampung sesuai dengan kontrak pada 18 November 2018		

Musi IV Rampung Sesuai Target Kontrak

PALEMBANG — Pembangunan Jembatan Musi IV sudah mencapai progres 97% sehingga proyek ini bakal rampung sesuai dengan kontrak pada 18 November 2018.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kiagus Syaiful Anwar, mengatakan jembatan sepanjang 1.300 meter itu akan segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan November.

"Rencananya peresmian oleh Presiden Joko Widodo dan setelahnya langsung bisa digunakan sebagai akses perlintasan kendaraan," katanya, Selasa (23/10).

Menurut Syaiful, pihaknya

tidak lagi menemukan kendala dalam pengerjaan fisik jembatan yang menghubungkan Kawasan Seberang Ulu dan Ilir kota tersebut. Sebelumnya, jembatan ini sempat terkendala pembebasan lahan dan sempitnya akses jalan menuju jembatan tersebut.

"Sekarang kami melakukan pengecoran akhir di lantai jembatan. Selanjutnya dilakukan *finishing*, dilanjutkan analisis trafik atau rekayasa lalu lintas," katanya.

Bahkan, menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel agar akses jalan menuju jembatan itu yang semula merupakan jalan milik pemerintah kota, menjadi jalan

milik nasional sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Syaiful mengklaim Jembatan Musi IV sebagai jembatan box girder terpanjang yang pernah ada saat ini dan dinilai cukup langka. "Jembatan ini pertama di Indonesia. Bukan hanya strukturnya tetapi juga teknologi alat pendeteksi kesehatan jembatan yang berada di jembatan itu sangat mendukung. Bahkan hanya 1 dari 70 jembatan di dunia yang menerapkan teknologi yaitu ada di jembatan ini," jelasnya.

Jembatan dengan dua lajur kendaraan itu diyakini mampu memiliki daya tahan selama 100 tahun.

"Saat ini jembatan Ampera

sudah sangat padat, sehingga diperlukan adanya jembatan lain, salah satunya Jembatan Musi IV. Menariknya, jembatan ini akan dihiasi berbagai ornamen khas Palembang," katanya.

Proyek infrastruktur tersebut mulai dikerjakan pada 2016 dengan panjang 1.300 meter dan lebar 12 meter.

Adapun kontrak jembatan itu mencakup 4 tahun dengan nilai anggaran Rp553 miliar. Pembebasan lahan, lelang dan kontrak pada 2015.

Kemudian dilakukan mobilisasi material dan pengerjaan lahan pada 2016, dilanjutkan pengerjaan struktur bangunan dan pada 2018 dilakukan pengerjaan bentang atas. (Dinda Wulandari)

Judul	KEK Antisipasi Bencana	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK sudah menyiapkan langkah preventif dan merancang sistem zonasi yang aman sebagai langkah untuk mengantisipasi risiko geologis serta potensi ancaman bencana alam terhadap kawasan tersebut.		

KEK Antisipasi Bencana

JAKARTA — Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK sudah menyiapkan langkah preventif dan merancang sistem zonasi yang aman sebagai langkah untuk mengantisipasi risiko geologis serta potensi ancaman bencana alam terhadap kawasan tersebut.

Dian Asmita A
redaksi@bisnis.com

Deputi Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengingatkan meskipun pengelolaan KEK dan wilayah sekitarnya harus memperhatikan aturan zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang, tetapi aktivitas ekonomi di dalam KEK juga menuntut kepatuhan terhadap *building code*.

Building code adalah seperangkat aturan teknis maupun aturan standar lainnya terkait dengan rancang bangun, konstruksi, pemeliharaan bangunan sesuai dengan karakteristik kawasan.

Adapun sistem zonasi sendiri merupakan implementasi Undang-Undang No. 39/2009 yang mewajibkan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan KEK yang berkesesuaian dengan tata ruang dan zonasinya.

"Pemerintah memiliki regulasi mulai dari rencana tata ruang dan mengatur zona mana yang bisa dan tidak bisa dibangun hingga persyaratan teknisnya dalam membangun sarana, prasarana dalam kawasan serta muatan industrinya," ujarnya kepada wartawan dalam acara Diseminasi Fasilitas Perdagangan Luar Negeri, Selasa (23/10).

Menurut Wahyu, Dewan Nasional KEK mengupayakan pengelolaan KEK yang lebih bersahabat dengan alam, salah satunya dengan menjalin kerja sama internasional dalam mendorong perilaku KEK yang 'hijau' atau Green Special Economic Zone (SEZ).

Adapun Dewan Nasional KEK saat ini tengah fokus untuk menuntaskan pedoman Green

► Dewan Nasional KEK saat ini tengah fokus untuk menuntaskan pedoman Green SEZ Guideline, bekerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI).

► Implementasi KEK diharapkan mendorong peningkatan ekspor dan daya saing produk nasional.

SEZ Guideline, bekerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI).

Pedoman tersebut, paparnya, bertujuan mendorong dan memperkuat langkah-langkah pengelolaan kebijakan KEK saat ini dan di masa depan.

Wahyu Utomo mengatakan KEK Palu yang terdampak bencana alam akan segera ditinjau kembali oleh Tim KEK. "Apakah KEK tersebut ke depannya masih dapat berfungsi secara maksimal atau tidak."

Pada prinsipnya, kata Wahyu, pihaknya ingin menciptakan iklim yang aman bagi investasi. Palu, menurutnya, dapat berkembang jika infrastrukturnya sudah beroperasi. "Jadi tidak hanya [KEK] saja yang menjadi fokus untuk diperbaiki," ujarnya.

LAPOR PRESIDEN

Wahyu Utomo menuturkan, tahun ini pemerintah masih dalam proses mempersiapkan empat KEK baru yang progresnya dilaporkan kepada Presiden setelah melalui tahap yang telah disepakati oleh Dewan Nasional KEK.

"[KEK] di Indonesia yang sudah memiliki payung hukum yakni peraturan pemerintah, saat

ini jumlahnya 12 KEK. Namun hanya 4 KEK yang baru beroperasi. Tahun ini, rencananya dibuat 4 KEK baru," ujarnya.

Wahyu menargetkan rencana ini akan dapat terealisasi sepenuhnya, tetapi sebelumnya dia harus memastikan bahwa 4 KEK baru tadi siap beroperasi.

Adapun KEK yang saat ini beroperasi yakni KEK Sei Mangkei di Sumatra Utara, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Palu di Sulawesi Tengah, dan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu KEK lainnya yang masih dalam pembangunan adalah KEK Tanjung Api-api di Sumatra Selatan, KEK Morotai di Maluku Utara, KEK Bitung di Sulawesi Utara, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kalimantan Timur, KEK Sorong di Papua, KEK Arun Lhokseumawe di Aceh, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, serta KEK Galang Batang di Bintan.

Dia menambahkan, neraca perdagangan Indonesia periode Januari hingga Agustus 2018 mengalami defisit hingga US\$4,09 miliar akibat laju impor yang lebih besar dibandingkan laju ekspor.

Implementasi KEK diharapkan mendorong peningkatan ekspor dan daya saing produk nasional.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan berdasarkan data PBB, Indonesia menjadi negara yang paling menjanjikan untuk tujuan investasi.

Hal tersebut tidak lepas dari strategi dan rumusan kebijakan nasional yang mendorong aliran investasi dan perdagangan.

Oke mengatakan untuk mendukung KEK Kementerian Perdagangan telah mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator KEK terkait, dan menetapkan KEK sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA).

Kemendag juga menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi badan usaha serta pelaku usaha terutama menyangkut lalu lintas barang.

Adapun administrator KEK yang telah ditetapkan sebagai IPSKA, selain dapat menerbitkan

SKA juga dapat menerbitkan surat kandungan nilai lokal sesuai ketentuan peraturan presiden pengganti undang-undang atau perppu.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 28/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/2015 tentang IPSKA.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, kata Oke, maka Kementerian Perdagangan telah menerbitkan delapan Permendag. "KEK yang menjadi administrator yakni, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Bitung, KEK Tanjung Api-api dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan. Permendag empat KEK lainnya saat ini dalam tahap penyusunan.

Kementerian Perdagangan juga memberikan pelatihan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan luar negeri kepada 12 administrator KEK guna meningkatkan kapasitas administrator.

Tahun ini, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No. 25/2018 tentang IPSKA, dan menetapkan KEK Sei Mangkei dan KEK Palu sebagai IPSKA.

Keputusan tersebut guna mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di KEK sekaligus meningkatkan akses pasar bagi hasil produksi yang diproduksi KEK serta menarik investor asing untuk berinvestasi di sana.

"Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Sekretaris Dewan Nasional [KEK] melakukan promosi kawasan melalui pendirian paviliun pada Trade Expo Indonesia 2018 yang dilengkapi dengan informasi terkait Intrade dan [SKA]," ujarnya.

SKA merupakan informasi yang diterbitkan oleh suatu negara yang berfungsi menjelaskan negara asal barang.

Pemerintah mendorong investor untuk membuat SKA karena memberikan kepastian hukum bahwa negara bersangkutan akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi produk ekspor tersebut. ■

Judul	Jateng Pacu Pelabuhan Terintegrasi Industri	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjajaki penambahan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri, perumahan, serta infrastruktur lainnya.		

Jateng Pacu Pelabuhan Terintegrasi Industri

SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjajaki penambahan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri, perumahan, serta infrastruktur lainnya. Harapannya, semakin banyak proyek terintegrasi akan memacu investasi dan menumbuhkan ekonomi provinsi ini.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen di sela-sela kunjungan kerja di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE), Gresik, Jawa Timur, Selasa (23/10).

"Saya sangat mengapresiasi keberadaan JIPE ini sebagai kawasan terintegrasi berskala nasional. Kami ingin belajar tentang bagaimana mekanisme pengelolaan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan seperti JIPE ini," ujar Taj Yasin dalam keterangan resminya.

Dia menambahkan, pelabuhan JIPE merupakan model pelabuhan yang ideal karena keberadaannya dapat menekan biaya produksi maupun distribusi barang.

Apabila berbagai sektor perusahaan berada dalam satu kawasan atau terintegrasi dengan pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, perumahan, serta keperluan lainnya maka akan muncul kontribusi positif terhadap efisiensi biaya logistik.

Adapun kunjungan kerja ini, lanjut dia, untuk mengetahui mekanisme penyelenggaraan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Ini termasuk dalam hal pengelolaan skema, penguasaan lahan, dan potensi interland sebagai pengguna pelabuhan, serta memiliki gambaran multimoda yang tepat diterapkan di Jawa Tengah.

Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini menyebutkan, sedikitnya ada sekitar delapan daerah di Jateng yang mengajukan pengembangan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan terintegrasi.

Salah satunya Kabupaten Kendal. Pembangunan kawasan terintegrasi itu juga berdampak pada banyaknya perusahaan di berbagai sektor yang akan masuk. "Harus ada terobosan-terobosan baru untuk mengatasi berbagai persoalan, terutama terkait perizinan dan pengoperasian kawasan industri. Maka nanti akan kita koordinasikan lagi bersama SKPD terkait," katanya.

Dia menjelaskan, Pemprov Jateng akan terus mendukung peningkatan ekonomi daerah, termasuk memberikan jaminan kemudahan perizinan kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya. Langkah tersebut merupakan salah satu strategi Pemprov untuk meningkatkan investasi.

Sementara itu, Direktur JIPE Henri Handoko menjelaskan, sebagai kawasan terintegrasi yang dapat diandalkan, JIPE yang mulai dibangun sekitar tahun 2013 itu memiliki dan mengelola sarana prasarana secara mandiri. Tidak hanya memenuhi kebutuhan industri tetapi juga untuk pelabuhan dan kawasan perumahan.

Dijelaskan, pelabuhan JIPE merupakan pelabuhan multifungsi dan menjadi gerbang perdagangan nasional dan internasional.

Pelabuhan tersebut menjadi salah satu pelabuhan dengan dermaga terpanjang di Indonesia yang mampu mengakomodasi kapal-kapal besar bermuatan lebih dari 100.000 ton.

"Pelabuhan JIPE merupakan pelabuhan *multiservice* yang mampu mengakomodir bongkar muat curah kering, curah air, kargo umum hingga peti kemas," imbuhnya.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, kata Henri, pelabuhan JIPE telah memberikan berbagai manfaat kepada pelaku industri. Di antaranya, memangkas jalur logistik menjadi lebih pendek, dan yang utama mampu melakukan efisiensi biaya operasional.

Dia menyampaikan, total lahan kawasan JIPE seluas 3.000 hektare, terdiri dari 800 hektare kawasan perumahan, 1.761 hektare kawasan industri, serta 400 hektare kawasan pelabuhan. Kendati Gresik bukan termasuk wilayah rawan tsunami, pinggiran pantai di kawasan JIPE telah dibangun tanggul penahan ombak setinggi 6 meter.

Kawasan JIPE mampu menjawab kebutuhan berbagai bidang industri, mulai dari industri ringan, kelas menengah, hingga kelas atas.

Selain itu, kawasan pelabuhan yang berlokasi di bagian terluar Selat Madura itu mewadahi usaha para pelaku industri untuk memberikan sinergi dan kesinambungan usaha. (a28)

Judul	Banyak Terobosan yang Belum Jalan	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia menganggap dalam 4 tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla muncul banyak terobosan kebijakan di bidang properti.		

Banyak Terobosan yang Belum Jalan

JAKARTA — Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia menganggap dalam 4 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla muncul banyak terobosan kebijakan di bidang properti, tetapi sayangnya sebagian belum berjalan, khususnya di daerah.

Sekretaris Jenderal DPP REI Paulus Totok mengatakan banyak gebrakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi, misalnya saja PP No. 64/2016 tentang Pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, dan aturan perizinan *online submission system* (OSS).

"Gebrakan pertama PP No. 64/2016 tentang perizinan rumah MBR yang menyatakan izin perumahan termasuk rekomendasi bisa dilakukan dengan maksimal waktu 70 hari untuk rumah MBR," katanya, Selasa (23/10).

Namun kenyataannya, Totok menilai peraturan itu belum berjalan dengan baik. Karena ada otonomi daerah yang kadang membuat aturan yang mempersulit pengembang dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut peraturan daerah tidak bisa dihapus jika bertentangan dengan peraturan di atasnya.

"Pelaksanaan di lapangan tidak jalan. Banyak kepentingan di daerah, baik yang bersifat politik dan lainnya. Yang jalan hanya di beberapa tempat, contohnya di Kalimantan Barat," jelas Totok.

Gebrakan kedua, menurut Totok, adalah *online submission system*. Dia menilai OSS seharusnya bisa berjalan karena pembentukannya masih baru. Dengan adanya OSS, dalam mengurus perizinan tidak perlu lagi adanya tatap muka, sehingga risiko transaksional dapat diminimalkan.

Namun, dia menilai di daerah kebijakan tersebut masih belum banyak dimulai dengan berbagai alasan teknis. Akan tetapi, lanjut Totok, hal tersebut tidak akan lama karena OSS memang wajib di semua daerah. Untuk penerapannya, seba-

gian wilayah sudah mulai berjalan.

Gebrakan berikutnya, katanya, adalah membangun rumah terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang melibatkan swasta. Dia mengatakan pelibatan swasta dalam membangun rumah terjangkau adalah yang pertama di dunia.

Dengan adanya terobosan-terobosan tersebut, seharusnya bisa disinkronkan dengan kebijakan di daerah, karena memang selama ini untuk proses perizinan dan lainnya banyak terkendala di pemda. "Harus ada keseriusan pemerintah pusat untuk melakukan pengawalan.

Sementara itu, Program Sejuta Rumah diprediksi tahun ini bakal tercapai, bakal melebihi target. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi A.H mengatakan hingga pertengahan Oktober 2018 pembangunan hunian telah mencapai 850.000. Dia optimistis pada tahun ini program sejuta rumah akan melampaui dari target dengan mencapai 1,1 juta unit rumah terbangun dan melakukan akad.

"Jadi sampai Desember saya tidak ragu lah, Bisa lebih dari 1 juta rumah. Apalagi ini kan Lombok [pembangunan rumah] dipercepat kemudian Palu juga [percepat bangun hunian]," ujarnya.

Khalawi mengatakan selama 4 tahun program berjalan memang belum pernah mencapai target sebanyak satu juta unit rumah terbangun. Walaupun demikian, ia mengatakan pencapaian tersebut mengalami tren kenaikan tiap tahunnya, sehingga pada 2019 juga akan melebihi dari 1 juta rumah.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, kinerja program Sejuta Rumah, pada 2015 telah mencapai sekitar 700.000 unit, pada 2016 mencapai 800.000 unit, pada 2017 mencapai 900 unit. (Maria Elena/ Finna U. Ulfia)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Program Sejuta Rumah		

► PROGRAM SEJUTA RUMAH



ANTARA/Nova Wahyudi

Foto udara pembangunan rumah bersubsidi di Banyuasin, Sumatra Selatan, Selasa (23/10). Pencapaian 4 tahun pemerintahan Joko

Widodo-Jusuf Kalla di bidang penyediaan perumahan rakyat sebanyak 1.139.672 unit hunian yang terbangun lewat program sejuta rumah.

Judul	FLPP Terganjal Sertifikat Layak Fungsi	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Belum banyaknya pemerintah daerah yang memiliki aturan sertifikat layak fungsi membuat penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tersendat.		

FLPP Terganjal Sertifikat Layak Fungsi

JAKARTA — Belum banyaknya pemerintah daerah yang memiliki aturan sertifikat layak fungsi membuat penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tersendat.

Finna U. Uifah
redaksi@bisnis.com

Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi A.H. mengatakan realisasi penyaluran FLPP masih terkendala beberapa faktor, antara lain aturan sertifikat layak fungsi (SLF) bagi unit hunian bersubsidi.

"Banyak kendala, salah satunya karena SLF. Kami lagi sosialisasi ke Pemda harus ada SLF untuk semua hunian, karena kualitas bangunan harus dijaga. Apa yang dibangun harus terjaga, dan tidak semua provinsi punya aturan SLF sehingga kami dorong ke sana," ujar Khalawi, Senin (22/10).

SLF merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus yang diterbitkan oleh Pemerintah, untuk menyatakan kelayakan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

Ketentuan SLF terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 64/2016 tentang Pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga mensyaratkan SLF terhadap bangunan perumahan MBR tersebut.

Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Adang Sutara mengatakan dalam membangun suatu hunian, setiap pengembang sebelum membangun wajib memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan setelah bangunan selesai dan akan diserahkan kepada konsumen, wajib memiliki SLF. Penerbitan IMB dan SLF tersebut menjadi wewenang daerah.

"Rata-rata pemda itu kan belum punya dan belum mengatur aturan

► Untuk menyalisasi aturan SLF, pengembang bisa menggunakan surat pernyataan dari tenaga ahli profesional terkait kelayakan fungsi unit hunian yang diserahkan.

SLF. Jadi banyak pengembang yang ketakutan, karena kalau tidak diterbitkan tidak cairkan dana FLPP dari PPDPP [Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)]." ujar Adang kepada *Bisnis*.

Untuk menyalisasi aturan SLF yang belum dimiliki beberapa pemda tersebut, Adang menjelaskan pengembang bisa menggunakan surat pernyataan dari tenaga ahli profesional terkait kelayakan fungsi unit hunian yang diserahkan.

Dia mengatakan setelah musibah bencana alam gempa bumi yang terjadi di Lombok dan Palu beberapa waktu lalu yang mengakibatkan rubuhnya banyak rumah masyarakat membuktikan masih banyak rumah masyarakat yang tidak layak fungsi.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR terus mendorong, baik kepada pemerintah daerah maupun pengembang, untuk selalu memperhatikan kualitas bangunan hunian masyarakat agar layak pakai.

KETERANGAN AHLI

Sekjen DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengakui pengembang dalam mensiasati aturan SLF ini dengan menggunakan Surat Keterangan Ahli (SKA) atau melalui tenaga ahli bersertifikat.

"Sudah tidak ada masalah dengan SLF. FLPP belum tersalurkan karena mulai bangunnya kami di bulan Mei. Karena gonjang-ganjing speknya mesti 10, 8 besi beton, kemudian perumahannya harus pakai plafon, ya termasuk SLF dan SKA ini, tetapi kan April sudah diputuskan. Jadi baru bangun di Mei dan kami kehilangan 4 bulan," ujar Totok saat dihubungi *Bisnis*, Selasa (23/10).

Totok mengatakan umumnya SLF dipergunakan di daerah kota besar dan lebih mengarah kepada gedung bertingkat, dengan minimal terdiri atas 5 lantai, sehingga untuk rumah sederhana yang penting adalah mengikuti kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR.

Adapun menurut Kepmen Kimpraswil 403/KPTS/M/2002 dan Permenpera no.22/2018 untuk menciptakan Rumah layak huni, harus memenuhi beberapa persyaratan.

Persyaratan tersebut termasuk, struktur konstruksi, atap, lantai, dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan kenyamanan, yaitu kokoh dan tidak ada retak-retak, terdapat jaringan air bersih dari PDAM/ sumber air bersih lainnya yang berfungsi, utilitas jaringan listrik yang berfungsi, jalan lingkungan yang telah diberi perkerasan dan berfungsi, saluran atau drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi, dan septitank yang berfungsi. ■

Masa Berlaku Sertifikat Layak Fungsi

- Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF).
- Bangunan gedung untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 tahun.
- Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun.
- Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan paling lambat 60 hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat itu berakhir.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/Prt/M/2007

Bisnis/Amri Hidayat



Judul	Sisa Target Jalan Tol 911 Kilometer Digeber pada 2019	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 21)		
Resume	Kementerian PUPR mengebut target penambahan jalan tol baru hingga akhir masa pemerintahan presiden Joko Widodo tahun depan		

Yohanes Paskalis Pae Dale
yohanes.paskalis@tempo.co.id

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengebut target penambahan jalan tol baru hingga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun depan. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan lembaganya sedikit lagi mencapai target yang ditetapkan pada masa awal pemerintahan. "Hanya sedikit lagi dan kami masih punya setahun. Yang sudah konstruksi digenot, yang masih persiapan kami kejar lelangnya," kata Herry kepada Tempo, kemarin.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian PUPR 2015-2019, BPJT menargetkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.060 kilometer. Jumlah itu akan menambah jalan bebas hambatan sepanjang 780 kilometer yang sudah dibangun pada era pemerintahan sebelumnya. Belakangan, pemerintah mengevaluasi rencana tersebut dan menaikkan targetnya menjadi 1.852 kilometer.

Herry menaparkan, pada periode 2015-2017, panjang ruas baru sudah mencapai 332 kilometer. Adapun pan-

Sisa Target Jalan Tol 911 Kilometer Digeber pada 2019

Pembebasan lahan masih menjadi faktor penghambat pembangunan.

jang total tol baru yang dibangun selama sembilan bulan terakhir mencapai 136 kilometer. Hingga akhir tahun, pemerintah pun akan mengoperasikan 13 ruas baru sepanjang 473 kilometer. "Jadi, kami bisa menembus pembangunan 941 kilometer tol baru pada tahun ini," ujarnya. "Berarti hanya tersisa 911 kilometer untuk mencapai target 1.852 kilometer."

Herry menjanjikan pembangunan tak akan melambat meski kelak target tercapai. Terutama, kata dia, untuk proyek tahapan panjang. Dia mencontohkan ruas Trans-Sumatera, yaitu Tebing Tinggi-Pematang Siantar dan Pematang Siantar-Parapat yang panjangnya mencapai 62 kilometer. Tol ini merupakan tahap lanjutan Medan-

Kualanamu-Tebing Tinggi yang rampung pada 2017.

"Itu dikejar sampai 2020. Memang masih lama karena dikerjakan belakangan," ujarnya.

Kepala Panitia Pelelangan BPJT, Eka Pria Anas, mengatakan persoalan lahan masih menjadi penghambat utama pengerjaan tol. Menurut dia, konstruksi kerap terganggu karena harus menunggu pengadaan lahan. "Umumnya lama karena negosiasi harga, pemenuhan dokumen. Ada pula yang setelah penentuan lokasi, masih ditolak masyarakat," kata Eka kepada Tempo.

Tol Cikopo Palimanan, Eka mencontohkan, bisa dirampungkan cepat ketika lahannya bebas secara menyeluruh. Tol sepanjang 116 kilometer itu diresmi-

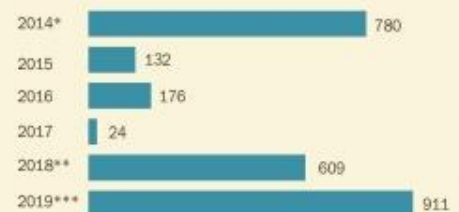
Bebas Hambatan Era Jokowi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pengoperasian jalan tol sepanjang total 1.852 kilometer hingga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019. Waktu yang tersisa akan digunakan untuk mengebut konstruksi dan menggilir peresmian tol terbangun.

Pembangunan Akses Darat 2014-2018 (Kilometer)



Pengerjaan Jalan Tol (Kilometer)



Realisasi dan Rencana Penyelesaian Proyek 2018



DATUM:

*1 KUMILATIF HINGGA 2014

**1 PROYEKSI HINGGA AKHIR TAHUN

***1 TARGET PEMBANGUNAN 2019

● YOHANES PASKALIS PAE DALE | SUMBER: BRT, WAWANCARA

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 21)		
Resume	Foto Udara pembangunan simpang susun jalan tol Sumatera ruas Kayu Agung-Palembang-Betung.		



Foto udara pembangunan simpang susun antara jalan tol Sumatera ruas Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) dan jalan tol Sumatera ruas Palembang-Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis pekan lalu.

kan pada 2015. "Jalur sepanjang itu diselesaikan dalam dua tahun, terbukti jadi sangat cepat," ujarnya.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoesjono memastikan pemerintah terus menggeber pengoperasian jalan tol meski masih tahap penyelesaian. "Makanya ada yang cuma 6 kilometer, asal *gate to gate* dan bisa dipakai, kami langsung fungsikan dulu," kata Basuki, kala mempresentasikan capaian empat tahun kinerja kementeriannya, kemarin.

Direktur Utama PT Waskita Toll Road, Herwidiakto, menilai pengembang tol lebih bersemangat dalam pengembangan proyek. Di Trans Sumatera, anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk itu menggenjot pengerjaan dua ruas, yakni Seksi 7 Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan ruas Kayu Agung-Palembang-Betung, agar bisa dibuka tahun depan. "Kami berkonsentrasi dengan yang sudah berjalan," kata Herwidiakto kepada *Tempo*.

● YOHANNES PRISKALIS PAE DALE |
HENDRIYONO HANDEZ

Judul	PAM Jaya Berfokus Tambah Jaringan Pipa di Kawasan Pesisir	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 27)		
Resume	PDAM Jakarta Raya berfokus menambah jaringan pipa air bersih di kawasan pesisir utara Jakarta hingga tahun depan.		

PAM JAYA

BERFOKUS TAMBAH JARINGAN PIPA DI KAWASAN PESISIR

SPAM Hutan Kota menyasar 30 ribu pelanggan baru di Jakarta Utara.

Avit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA – Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) berfokus menambah jaringan pipa air bersih di kawasan pesisir utara Jakarta hingga tahun depan. Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, mengatakan penduduk berpenghasilan rendah di kawasan pesisir bakal dilayani air bersih dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Hutan Kota.

Bambang menerangkan, proyek SPAM Hutan Kota, yang dimulai pada awal tahun ini, ditargetkan rampung pada akhir 2019. "Saat ini sedang dalam proses tender dan perizinan," ujarnya kepada *Tempo*, kemarin.

Proyek SPAM Hutan Kota, menurut Bambang, akan dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama, dengan bujet sekitar Rp 300 miliar, dananya berasal dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2017. Adapun proyek tahap kedua, dengan anggaran Rp 150 miliar, dibiayai dari PMD pada APBD Perubahan 2018.

Menurut Bambang, SPAM Hutan Kota bakal mengalir kawasan Kamal Muara, Kamal, Pegadungan, Tegal Alur, Muara Angke, dan Muara Baru, Jakarta Utara. Sejauh ini, wilayah tersebut belum terjangkau layanan air pipa. Padahal air tanah di sana tak layak dikonsumsi. "Tidak memenuhi persyaratan kualitas untuk air minum," tuturnya.

Instalasi pipa SPAM Hutan Kota sepanjang 120 kilometer, menurut Bambang, bakal melayani 30 ribu pelanggan baru

di pesisir Jakarta. Meski begitu, Bambang mengakui kehadiran SPAM Hutan Kota belum cukup melayani 1,76 juta penduduk Jakarta Utara.

Dalam pembahasan APBD Perubahan 2018, pemerintah DKI Jakarta mengusulkan tambahan penyertaan modal daerah sekitar Rp 1,2 triliun untuk PAM Jaya. Selain untuk SPAM Hutan Kota, dana tersebut untuk membangun instalasi SPAM Ciliwung dan SPAM Pesanggrahan.

SPAM Ciliwung akan melayani pelanggan di wilayah Pejaten, Rawajati, Pasar Minggu, dan Tanjung Barat. Adapun SPAM Pesanggrahan akan melayani pelanggan di wilayah Lebak Bulus, Bintaro, Kebayoran, Petukangan, dan Kebon Jeruk. "Kami ajukan Rp 12 triliun untuk meningkatkan pelayanan air bersih, tapi tak disetujui Dewan," kata Gubernur DKI Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta memang memangkas tambahan modal untuk PAM Jaya tersebut. Alasannya, PAM Jaya masih memiliki kontrak kerja sama dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Dewan meminta DKI memperjelas nasib kontrak kerja sama dengan

kedua perusahaan tersebut. Sebab, Mahkamah Agung telah meminta pemerintah DKI mengakhiri privatisasi air di Ibu Kota.

Direktur Amrta Institute, Nila Ardhanie, mendukung upaya PAM Jaya untuk membangun jaringan pipa bagi warga Jakarta. Dia mendorong agar secara perlahan penduduk Jakarta berpindah dari penggunaan air tanah ke air pipa. "Penghentian pengambilan air tanah juga menekan peningkatan *land subsidence* (penurunan permukaan tanah) di Jakarta," tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga 2016, jaringan pipa air bersih di Ibu Kota hanya menjangkau 839.391 pelanggan. Padahal jumlah penduduk Jakarta pada

tahun itu sekitar 10,28 juta jiwa atau sekitar 2,68 juta rumah tangga. Mereka yang belum terlayani air pipa dipastikan memakai air tanah untuk keperluan sehari-hari.

Laporan Amrta Institute bahkan menyebutkan jumlah konsumen air bersih di Jakarta lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Memperhitungkan orang luar Jakarta yang sehari-hari bekerja di Ibu Kota, Amrta memperkirakan konsumen air bersih sekitar 12,5 juta jiwa. Artinya, total kebutuhan air bersih di Ibu Kota sekitar 26 ribu liter per detik. Sedangkan pasokan air bersih yang disediakan PAM Jaya dan dua mitra swastanya maksimal hanya sekitar 20 ribu liter per detik.

● AVIT HIDAYAT | M. JULIUS FIRMANSIH

Judul	Jokowi Antar Pariwisata RI Ke Peringkat 9 Dunia	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 18)		
Resume	Pertumbuhan pariwisata Indonesia Januari – Desember 2017 mencapai 22% atau di atas rata-rata		

Jokowi Antar Pariwisata RI ke Peringkat 9 Dunia

PERTUMBUHAN sektor pariwisata Indonesia sepanjang Januari-Desember 2017 mencapai 22% dan menempati peringkat ke-9 tertinggi dunia, mengungguli Malaysia (4%), Singapura (5,8%), dan Thailand (8,7%).

Tak hanya itu, selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pariwisata juga sukses menyumbang devisa keempat terbesar dan mematahkan dominasi sektor berbasis sumber daya alam (SDA),

“Diumumkan The World Travel & Tourism Council (WTTC) bahwa Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata tertinggi nomor sembilan di dunia,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.

Arief memaparkan pertumbuhan pariwisata RI pada Januari-Desember 2017 mencapai 22%, atau di atas rata-rata pertumbuhan wisatawan dunia sebesar 6,4% dan pertumbuhan wisatawan di ASEAN 7%.

Selain Indonesia, pertumbuhan pariwisata tertinggi diraih Vietnam sebesar 29%. Arief menilai Vietnam tumbuh lebih baik salah satunya karena melakukan banyak deregulasi.

Dari sektor pariwisata pula, RI mengantongi devisa sebanyak US\$15 miliar, atau peringkat keempat terbesar setelah kelapa sawit (CPO), minyak dan gas bumi, serta

“Pertumbuhan pariwisata Indonesia Januari-Desember 2017 mencapai 22%, atau di atas rata-rata.”

Arief Yahya

Menteri Pariwisata

pertambangan (batu bara). Raihan devisa pariwisata 2017 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang hanya US\$13,6 miliar. “Sumbangan devisa dari sektor pariwisata meningkat sejak 2015 dari US\$12,2 miliar pada 2016 menjadi US\$13,6 miliar,” imbuhnya.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga dilaporkan terus melejit, dari 2015 sebanyak 9,7 juta orang menjadi 14 juta pada 2017.

Terkait dengan ulah agen *travel* yang mengobral murah pariwisata Bali ke wisman asal Tiongkok, Menpar mengaku akan memverifikasi ulang daftar agen *travel* Tiongkok yang teregistrasi. “Kalau teregistrasi melakukan itu, tinggal cabut,” serunya.

Seperti diketahui, destinasi wisata Bali dirusak ulah agen *travel* yang mengobral murah tarif ke wisatawan asal Tiongkok. (Nur/Ant/H-3)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 24 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 19)		
Resume	Tol Brebes Timur - Pemalang		



ANTARA/OKY LUKMANSYAH

TOL BREBES TIMUR-PEMALANG: Kendaraan melintas di Tol Brebes Timur-Pemalang, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (23/10). Pembangunan Tol Brebes Timur-Pemalang sepanjang 37 kilometer tersebut menghubungkan Jakarta-Jawa Tengah menjadi salah satu pencapaian empat tahun Pemerintahan Jokowi-JK di bidang pembangunan infrastruktur.